

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN REHABILITASI MEDIK
DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN
REHABILITASI MEDIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG PERATURAN DIREKTUR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat kurang mampu. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya hasil Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat Perdirjampelkes) yang diketahui bahwa aturan tersebut membatasi pasien Fisioterapi yang akan melakukan Rehabilitasi Medik jika melebihi batas akan dikenakan biaya lebih, sementara masyarakat kurang mampu tidak dapat membayarnya. Permasalahan mengenai tanggungjawab pemerintah dalam melayani pasien BPJS Kesehatan merupakan hal yang perlu dikaji.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai perlindungan pasien rehabilitasi medik pasca Putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan Perdirjampelkes.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum perlu adanya kepastian hukum jika tidak maka kesejahteraan masyarakat akan sirna. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dari pemerintah kepada pasien fisioterapi yaitu berupa pemenuhan hak-hak masyarakat terutama terhadap segala kekurangan kebutuhan pasien dalam melayani pasien BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: BPJS, Pasien Fisioterapi, Rehabilitasi Medik.

**LEGAL REVIEW OF THE PROTECTION OF MEDICAL
REHABILITATION PATIENTS CONNECTED TO THE POLICY OF
MEDICINE REHABILITATION PATIENTS BASED ON INVITATION -
INVITATION NUMBER 36 OF JUNCTO HEALTH POST OF SUPREME
COURT DECREE CONCERNING REGULATION OF THE DIRECTOR
NUMBER 5 OF 2018 CONCERNING GUARANTEE OF MEDICAL
REHABILITATION SERVICES**

ABSTRACT

Health is a basic right of every individual, and all citizens have the right to receive health services including the poor. The government's effort to prosper the lives of its people is proven by forming the Social Security Organizing Agency (BPJS). But in reality, the government's efforts to create a prosperous community life have not been fulfilled properly. This is due to the result of the Supreme Court's Decision canceling the Director of Health Services Regulation Number 5 Year 2018 (hereinafter abbreviated Perdirjampelkes) which is known that the regulation limits Physiotherapy patients who will carry out Medical Rehabilitation if it exceeds the limit will incur more costs, while the poor can afford can't pay it. The issue of government responsibility in serving BPJS Health patients is something that needs to be examined.

The method in this study is a normative juridical research method focused on examining the application of legal norms or norms in positive law. The approach used is the law approach which refers to primary and secondary legal materials. Through this research method, the writer will get an analysis of medical rehabilitation patient protection after the Supreme Court Decision regarding the cancellation of Perdirjampelkes.

The results of the study concluded that legal protection needs legal certainty if not, then people's welfare will disappear. The form of legal protection that can be given from the government to physiotherapy patients is in the form of fulfilling the rights of the community, especially against any shortcomings of patient needs in serving BPJS Health patients.

Keywords: BPJS, Physiotherapy Patients, Medical Rehabilitation.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
1) Kerangka Teori.....	9
2) Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1) Jenis Penelitian.....	14

2) Sifat Penelitian.....	14
3) Pendekatan Penelitian.....	15
4) Jenis Data.....	15
5) Teknik Pengumpulan Data.....	16
6) Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN REHABILITASI MEDIK
YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN KESEHATAN FISIOTERAPI DI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

A. Perlindungan Hukum.....	20
B. Rehabilitasi Medik.....	23
1) Pengertian Rehabilitasi Medik.....	24
2) Falsafah Rehabilitasi Medik.....	26
3) Beragam Kondisi yang Memerlukan Rehabilitasi.....	28
4) Cakupan Pelayanan Fisioterapi.....	30
5) Rumah Sakit sebagai sarana Pemerintah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009).....	34
6) Hubungan Hukum Pasien BPJS dengan BPJS.....	35
7) Hubungan Hukum Pasien BPJS dengan Tenaga Medis (dokter).....	36
8) Perlindungan Pasien sebagai Konsumen.....	36

BAB III KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN REHABILITASI MEDIK DAN HAK-HAK YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN YANG HARUS DILINDUNGI PEMERINTAH MENGENAI PEMBATAAN PASIEN FISIOTERAPI

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	38
B. Hak-Hak Bagi Masyarakat Menurut Undang-Undang Kesehatan.....	39
C. Hak – Hak Pasien yang Berlaku.....	41
D. Transaksi Terapeutik yang Melandasi Pelayanan Kesehatan.....	44

BAB IV ANALISA TERHADAP PERLINDUNGAN PASIEN REHABILITASI MEDIK YANG DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR BPJS TERBARU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

4.1 Peraturan Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasca Putusan Mahkamah Agung dikaitkan dengan Kepastian Hukum.....	46
4.2 Perlindungan hukum terhadap pasien yang memerlukan pelayanan fisioterapi yang terkena dampak aturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.....	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
---------------------	----

LAMPIRAN.....	78
---------------	----